

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrianto, N. (2007). *Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Aucoin, P., & Heintzman, R. (2000). The Dialectics Of Accountability For Performance In Public Management Reform. *International Review Of Administrative Sciences*, 66(1), 45–55.
- Bogdan, Robert, & Taylor, Steven. (1975). *Introducing To Qualitative Methods: Phenomenological*. New York: A Wiley Interscience Publication.
- Boncondin, E. T. (2007). Citizen Engagement In Budgeting And Public Accountability. *6th Session Of The United Nations Committee Of Expert On Public Administration*.
- Bovens, M. (2006). Analysing And Assessing Public Accountability. A Conceptual Framework. *European Governance Papers (Eurogov) No. No. C-06, 12006*.
- Bovens, M. (2007). Analysing And Assessing Accountability: A Conceptual Framework 1. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Corynata, I. (2012). *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah*. 12(2), 110–125.
- Denzin, N. K. (2013). *Interpretive Autoethnography*. Sage Publications.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Inanga, E. (1991). *Accounting And Accountability (Inaugural Lecture Series)*. University Of Ibadan.
- Iyoha, F. O., & Oyerinde, D. (2010). Accounting Infrastructure And Accountability In The Management Of Public Expenditure In Developing Countries: A Focus On Nigeria. *Critical Perspectives On Accounting*, 21(5), 361–373.
- Kansil, C. S. T. (1984). *Desa Kita: Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia.
- Krina, L. L., & Lalolo, L. (2003). Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi. *Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Madjid, J. (2019). *Akuntansi Sekor Publik*. In Yogyakarta (Issue 25).
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing Valid Meaning From Qualitative Data: Toward A Shared Craft. *Educational Researcher*, 13(5), 20–30.

- Nugroho, R. E. S. (2018). *Estimasi Biaya Konstruksi, Sanitasi, Dan Perawatan Gedung*. Andi.
- Pollitt, C. (2003). *The Essential Public Manager*. Mcgraw-Hill Education (Uk).
- Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., Ak., C. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Andi Offset.
- Rachim, A. (2015). *Barometer Keuangan Negara*. Yogyakarta: Cv Andi Offset.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing
- Sarundajang, S. H. (2005). *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara, Sebuah Pengantar: Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Perkembangan, Kondisi, Dan Tantangan*. (No Title).
- Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., Par, S. S., Par, M., Suraoka, I. P., St, S., . & Massenga, I. T. W. (2023). *Metodelogi Penelitian*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Scapens, R. W. (2006). Understanding Management Accounting Practices: A Personal Journey. *British Accounting Review*, 38(1), 1–30. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2005.10.002>
- Schlenker, B. R. (1997). Personal Responsibility: Applications Of The Triangle Model. *Research In Organizational Behavior, Vol 19, 1997, 19*, 241–301.
- Schedler, A., Diamond, L. J., & Plattner, M. F. (1999). *The Self-Restraining State: Power And Accountability In New Democracies*. Lynne Rienner Publishers.
- Sinclair, A. (1995). The Chameleon Of Accountability: Forms And Discourses. *Accounting, Organizations And Society*, 20(2–3), 219–237. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(93\)E0003-Y](https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)E0003-Y)
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Edisi Kedua*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Cetakan Ke23). Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, A. H. (2000). *Akuntansi, Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Bpfe Ugm.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jkap (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Widjaja, H. A. W. (2007). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*.

Jurnal

- Aziz, N. L. L., & Zuhro, R. S. (2018). *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gaber, J. (2019). Building “A Ladder Of Citizen Participation”: Sherry Arnstein, Citizen Participation, And Model Cities. *Journal Of The American Planning Association*, 85(3), 188–201. <https://doi.org/10.1080/01944363.2019.1612267>
- Madjid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In *Yogyakarta* (Issue 25).

- S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing.
- Sondakh, S., Rorong, A. J., & Ruru, J. M. (2023). Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 1–12.
- Supit, B. F., & Lumingkewas, E. M. C. (2023). Pengantar Administrasi Keuangan Daerah. In D. T. Pangalila, S.Fils. M.Pd (Ed.), *Cet Pertama* (Pp. 1–19). Eureka Media Aksara.
- Syahidin, S., & Jalil. M, A. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal Of Economics Review*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.55542/Gpjer.V2i1.162>
- Tanjung, A. H. (2000). *Akuntansi, Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Bpfe Ugm.
- Umiani, W. O., & Sujana, I. W. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Kasus Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Umbuton*, 3(2747–2779), 16–35.
- Yuhertiana, C. M. & I. (2022). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pelapora Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar)*. 3, 509–514.
- Yuliyanti, F., Radjikan, R., & Santoso, T. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 2(3), 1288–1293. <https://doi.org/10.53363/Bureau.V2i3.123>
- Lainnya**
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004* (pp. 1–3).
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Tabel III Daftar Pertanyaan Wawancara

Variabel	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Tranparansi	ketersediaan informasi publik diukur melalui parameter seperti publikasi laporan keuangan aktual, penyajian daftar program dan proyek yang didanai melalui DAU, dan transparansi rinci terkait alokasi dana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pemerintah Kelurahan mempublikasikan laporan keuangan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU)? 2. Apakah daftar program dan proyek yang didanai melalui DAU dipublikasikan secara terbuka? Jika ya, melalui media apa saja?
	aksesibilitas informasi oleh masyarakat menjadi indikator krusial, mencakup evaluasi terhadap sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi melalui saluran komunikasi beragam, termasuk platform daring resmi, pertemuan publik, dan jalur komunikasi lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 3) Sejauh mana rincian alokasi dana dijelaskan kepada masyarakat? 4) Apa saja saluran komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kelurahan untuk menyebarluaskan informasi terkait DAU? 5) Bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan DAU? Apakah ada Platform daring resmi atau pertemuan publik yang diadakan secara rutin?
	kejelasan prosedur pengambilan keputusan menjadi fokus ketiga, menilai sejauh mana prosedur-prosedur tersebut dijelaskan kepada masyarakat serta tingkat keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan sehubungan dengan alokasi dan penggunaan DAU	<ol style="list-style-type: none"> 6) Apa saja saluran komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kelurahan untuk menyebarluaskan informasi terkait DAU? 7) Bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan DAU? Apakah ada platform daring resmi atau pertemuan publik yang diadakan secara rutin?
Akuntabilitas	Evaluasi mekanisme akuntabilitas yang	<ol style="list-style-type: none"> 8) Bagaimana mekanisme akuntabilitas diterapkan oleh Pemerintah

	diterapkan melibatkan penelitian terhadap kerangka dan prosedur formal yang diimplementasikan oleh pemerintah kelurahan untuk memastikan pertanggungjawaban dalam pengelolaan DAU.	Kelurahan dalam pengelolaan DAU?
	Ketatnya pengawasan internal dan eksternal menjadi fokus penting, mencakup pemantauan risiko dan kelemahan internal serta peran lembaga audit independen atau pihak ketiga dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana	9) Bagaimana proses pengawasan internal dilakukan dalam pengelolaan DAU? 10) Apakah ada lembaga audit independen atau pihak ketiga yang terlibat dalam mengawasi pengelolaan DAU? Jika ya, bagaimana peran mereka?
	Responsivitas terhadap umpan balik dan pertanyaan masyarakat menjadi indikator krusial, mencakup keterbukaan, kemampuan mengatasi kekurangan, dan efektivitas komunikasi untuk memelihara tingkat kepercayaan dan akuntabilitas publik.	11) Bagaimana Pemerintah Kelurahan merespons umpan balik dan pertanyaan masyarakat terkait pengelolaan DAU?
Pengelolaan Dana Alokasi Umum	Persentase alokasi dana yang telah digunakan untuk program dan proyek sesuai dengan kebutuhan masyarakat melibatkan penilaian terhadap relevansi alokasi dana dengan aspirasi lokal.	12) Bagaimana Pemerintah Kelurahan memastikan bahwa alokasi dana digunakan untuk program dan proyek sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
	ketercapaian target pembangunan yang direncanakan mengukur	13) Sejauh mana target pembangunan yang direncanakan tercapai melalui

	keberhasilan implementasi program dan proyek DAU dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah diidentifikasi	program dan proyek DAU?
	Tingkat pertanggungjawaban penggunaan dana secara finansial berdasarkan evaluasi pada ketaatan terhadap regulasi keuangan, kelengkapan pelaporan, dan integritas manajemen keuangan DAU.	14) Bagaimana Pemerintah Kelurahan memastikan ketaatan terhadap regulasi keuangan dalam penggunaan DAU? 15) Bagaimana integritas manajemen keuangan DAU dijaga oleh Pemerintah Kelurahan?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber



Lampiran 3 Transkrip Wawancara

A. Kelurahan : Kelurahan Tanjung

Nama : Bapak Dibyo

Jabatan : Lurah Kelurahan Tanjung

Pertanyaan 1 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan mempublikasikan laporan keuangan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU)?

Jawaban :

“Kami tidak melaporkan ke masyarakat karena kewajiban kita hanya kepada kecamatan dan kabupaten, dan ya itu PPK iyaa.. jadi kewajiban kami hanya sebatas memberi tahu bahwa akan ada pengerjaan di wilayah A misalnya, kalau untuk laporan keuangan detailnya ya tidak bisa”

Pertanyaan 2 :

Apakah daftar program dan proyek yang didanai melalui DAU dipublikasikan secara terbuka? Jika ya, melalui media apa saja?

Jawaban :

“Ya, melalui MUSRENBANG di setiap tahunnya, itukan program yang ada di setiap tahunnya mba, jadi biasanya itu kita mengadakan di Bulan januari membahas mengenai apa yang harus dibenahi begituu”

Pertanyaan 3 :

Sejauh mana rincian alokasi dana dijelaskan kepada masyarakat?

Jawaban :

“Tentu akan disampaikan apa saja bentuk kegiatannya dan pemilihan kegiatannya, yaitu skala prioritasnya. Jadi nanti yang terpilih itu adalah dari skala prioritasnya dongg”

Pertanyaan 4 :

Apa saja saluran komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kelurahan untuk menyebarluaskan informasi terkait DAU?

Jawaban :

“Ya, melalui MUSRENBANG, kegiatan-kegiatan rapat koordinasi pemerintah baik dari RT maupun RW dan pihak lainnya. Dan untuk salurannya biasanya WA grup”.

Pertanyaan 5 :

Bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan DAU? Apakah ada Platform daring resmi atau pertemuan publik yang diadakan secara rutin?

Jawaban :

“Akses informasi dapat diambil dari pertemuan MUSRENBANG dan kegiatan koordinasi yang sudah disebutkan tadi”.

Pertanyaan 6 :

Bagaimana prosedur pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan DU dijelaskan ke masyarakat?

Jawaban :

Melalui MUSRENBANG.

Pertanyaan 7 :

Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan? Jika iya bagaimana caranya?

Jawaban :

“Dari tadi, penyampaian opini di MUSRENBANG, dan kemudian dipilih berdasarkan skala prioritas yang mampu didanai oleh DAU pemerintah, karena dananya terbatas”.

Pertanyaan 8 :

Bagaimana mekanisme akuntabilitas diterapkan oleh Pemerintah Kelurahan dalam pengelolaan DAU?

Jawaban :

“kami tidak bisa menetapkan itu, karena aturan itu dari pemerintah dalam permendagri 130 tahun 2018. Informasi mengenai selesainya program kerja kami sampaikan ke masyarakat”

Pertanyaan 9 :

Bagaimana proses pengawasan internal dilakukan dalam pengelolaan DAU?

Jawaban :

“Dalam penyelenggaraan DAU itu disediakan untuk perencanaan dan pengawasan, tusi perencanaan oleh LPMK dan pengawasan internal dilakukan oleh Dinas teknis terkait”

Pertanyaan 10 :

Apakah ada lembaga audit independen atau pihak ketiga yang terlibat dalam mengawasi pengelolaan DAU? Jika ya, bagaimana peran mereka?

Jawaban :

“kami tidak punya wewenang untuk ini tetapi secara umum pengawasan secara umum di lakukan oleh INSPEKTORAT, yang nantinya akan meneliti dari perencanaan dan pelaksanaan”

Pertanyaan 11 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan merespons umpan balik dan pertanyaan masyarakat terkait pengelolaan DAU?

Jawaban :

Melalui tatap mukaa

Pertanyaan 12 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan memastikan bahwa alokasi dana digunakan untuk program dan proyek sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Jawaban :

"kami menyakini itu sudah sesuai karena itu dilaksanakan menurutu skala prioritas yang ada"

Pertanyaan 13 :

Sejauh mana target pembangunan yang direncanakan tercapai melalui program dan proyek DAU?

Jawaban :

"100%, karena sudah di rencanakan di tahun anggaran sebelumnya"

Pertanyaan 14 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan memastikan ketaatan terhadap regulasi keuangan dalam penggunaan DAU?

Jawaban :

"di dalam penggunaan DAU terdapat aturan mainnya, dimulai dai penyusunan anggaran yang disaring di MUSRENBANG dan ditetpakn di DPA. Kami harus mengunggah perencanaan di LPSM. Aturan ini adalah aturan baku yang dimana harus dilaksanakan"

Pertanyaan 15 :

Bagaimana integritas manajemen keuangan DAU dijaga oleh Pemerintah Kelurahan?

Jawaban :

"Kami dari kelurahan hanya mentaati setiap regulasi yang ada"

B. Kelurahan : Kelurahan Purwokerto Kulon

Nama : Ibu Zulanda Virgi

Jabatan : Sekretaris Kelurahan Purwokerto Kulon

Pertanyaan 1 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan mempublikasikan laporan keuangan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU)?

Jawaban :

"kami tida melaporkan atau melakukan publikasi DAU ke masyarakat hanya ke Kecamatan atau Kabupaten"

Pertanyaan 2 :

Apakah daftar program dan proyek yang didanai melalui DAU dipublikasikan secara terbuka? Jika ya, melalui media apa saja?

Jawaban :

Tidak melakukan menjelaskan rincian alokasi dana ke masayarakat"

Pertanyaan 3 :

Sejauh mana rincian alokasi dana dijelaskan kepada masyarakat?

Jawaban :

"Tidak melakukan menjelaskan rincian alokasi dana ke masayarakat"

Pertanyaan 4 :

Apa saja saluran komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kelurahan untuk menyebarluaskan informasi terkait DAU?

Jawaban :

"Saluran yang digunakan adalah yang digunakan untuk melaporkan alokasi dana ke pemerintah pusat yaitu SIPD.RI dannanti dari pihak kecamatan juga melaorka ke BKAD. Kami juga meyerahkan bentuk hardfile ke kecamatan"

Pertanyaan 5 :

Bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan DAU? Apakah ada Platform daring resmi atau pertemuan ublik yang diadakan secara rutin?

Jawaban :

"Untuk DAKEL itu masyarkat menyampaikan di MUSRENBANG mengenai pembangunan yang ingin dilakukan"

Pertanyaan 6 :

Bagaimana prosedur pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan DU dijelaskan ke masyarakat?

Jawaban :

"kami tidak menyebarkan informasi terkait DAU"

Pertanyaan 7 :

Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan? Jika iya bagaimana caranya?

Jawaban :

"Melibatkan untuk memberikan opini atau saran di dalam MUSRENBANG"

Pertanyaan 8 :

Bagaimana mekanisme akuntabilitas diterapkan oleh Pemerintah Kelurahan dalam pengelolaan DAU?

Jawaban :

"Dengan mengevaluasi kembali anggaran yang nantinya akan dilaporkan ke kecamatan"

Pertanyaan 9 :

Bagaimana proses pengawasan internal dilakukan dalam pengelolaan DAU?

Jawaban :

"melakukan tinjauan ulang atas program yang dijalankan dan bekerja sama dengan para pengawas"

Pertanyaan 10 :

Apakah ada lembaga audit independen atau pihak ketiga yang terlibat dalam mengawasi pengelolaan DAU? Jika ya, bagaimana peran mereka?

Jawaban :

"ada, dari rekanan yang mengawasi jalannya sampai selesai, baik dari pemda dan pusat. Dan melihat lagi bahwa apakah pengerjaan sudah sesuai prosedur atau belum"

Pertanyaan 11 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan merespons umpan balik dan pertanyaan masyarakat terkait pengelolaan DAU?

Jawaban :

"biasanya ini diwakilkan oleh baik ketua RT atau RW, yang berasal dari warga masing-masing melalui formulir yang sudah disediakan. Kemudian dari pihak RT maupun RW yang menanyakan ke kelurahan"

Pertanyaan 12 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan memastikan bahwa alokasi dana digunakan untuk program dan proyek sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Jawaban :

"Memastikannya karena sudah ada usulan dari warga yang dikumpulkan tadi di MUSRENBANG dan kemudian dipilih yang paling urgent atau menurut skala prioritasnya"

Pertanyaan 13 :

Sejauh mana target pembangunan yang direncanakan tercapai melalui program dan proyek DAU?

Jawaban :

"Ada pembangunan yang terealisasi dan ada yang tidak"

Pertanyaan 14 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan memastikan ketaatan terhadap regulasi keuangan dalam penggunaan DAU?

Jawaban :

"terdapat tim perencanaan dan tim pengawas"

Pertanyaan 15 :

Bagaimana integritas manajemen keuangan DAU dijaga oleh Pemerintah Kelurahan?

Jawaban :

"dengan menyusun RAB yang diawal sudah menyusun perencanaan sampai dengan akhir yang nanti akan ditinjau kembali. Apakah harga sesuai dengan yang direncanakan atau tidak"

C. Kelurahan : Kelurahan Karanglesem

Nama : Ibu tri Pujiarti dan Ibu Restu wardani

Jabatan : Kasi Permas dan Staff Keuangan

Pertanyaan 1 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan mempublikasikan laporan keuangan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU)?

Jawaban :

"melaporkan ke kecamatan melalui SPJ keuangan"

Pertanyaan 2 :

Apakah daftar program dan proyek yang didanai melalui DAU dipublikasikan secara terbuka? Jika ya, melalui media apa saja?

Jawaban :

Melalui Aplikasi SIRUP"

Pertanyaan 3 :

Sejauh mana rincian alokasi dana dijelaskan kepada masyarakat?

Jawaban :

"kami menjelaskan melalui LPMK, MUSRENBANG tingkat kelurahan"

Pertanyaan 4 :

Apa saja saluran komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kelurahan untuk menyebarluaskan informasi terkait DAU?

Jawaban :

"Melalui LPMK (Lembaga Masyarakat Kelurahan)"

Pertanyaan 5 :

Bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan DAU? Apakah ada Platform daring resmi atau pertemuan publik yang diadakan secara rutin?

Jawaban :

"melakukan rapat koordinasi bersama yaitu antara LPMK dengan masyarakat"

Pertanyaan 6 :

Bagaimana prosedur pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan DU dijelaskan ke masyarakat?

Jawaban :

"melalui itu tadi MUSRENBANG"

Pertanyaan 7 :

Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan? Jika iya bagaimana caranya?

Jawaban :

"Melalui MURENBANG yang diadakan setiap 1 tahun sekali"

Pertanyaan 8 :

Bagaimana mekanisme akuntabilitas diterapkan oleh Pemerintah Kelurahan dalam pengelolaan DAU?

Jawaban :

"Dengan mengoptimalkan jumlah alokasi dana dari Pemerintah"

Pertanyaan 9 :

Bagaimana proses pengawasan internal dilakukan dalam pengelolaan DAU?

Jawaban :

"Dengan membuat SPJ agar setiap hal yang di belanjakan dapat dengan jelas di laporkan"

Pertanyaan 10 :

Apakah ada lembaga audit independen atau pihak ketiga yang terlibat dalam mengawasi pengelolaan DAU? Jika ya, bagaimana peran mereka?

Jawaban :

"ya ada , yaitu BKAD yang tuagsnya untuk mengevaluasi SPJ"

Pertanyaan 11 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan merespons umpan balik dan pertanyaan masyarakat terkait pengelolaan DAU?

Jawaban :

"masyarkat melakuakn koordinasi dengan Lurah melalui LPMK"

Pertanyaan 12 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan memastikan bahwa alokasi dana digunakan untuk program dan proyek sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Jawaban :

"Melakukan koordinasi dengan pihak rekanan"

Pertanyaan 13 :

Sejauh mana target pembangunan yang direncanakan tercapai melalui program dan proyek DAU?

Jawaban :

"Melakukan koordinasi dengan pihak rekanan"

Pertanyaan 14 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan memastikan ketaatan terhadap regulasi keuangan dalam penggunaan DAU?

Jawaban :

"kami melakukan setiap keuangan dengan menaatai atau melakukan sesuai dengan SPK"

Pertanyaan 15 :

Bagaimana integritas manajemen keuangan DAU dijaga oleh Pemerintah Kelurahan?

Jawaban :

"Dengan kami membuat SPJ tepat waktu"

D. Kelurahan : Kelurahan Teluk

Nama : Bapak Nugroho

Jabatan : Sekretaris Kelurahan

Pertanyaan 1 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan mempublikasikan laporan keuangan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU)?

Jawaban :

Belum ada komunikasi dengan masyarakat mengenai ini

Pertanyaan 2 :

Apakah daftar program dan proyek yang didanai melalui DAU dipublikasikan secara terbuka? Jika ya, melalui media apa saja?

Jawaban :

"Tidak ada, karena DAU ini digunakan untuk pemeliharaan kelurahan dan belanja bulanan,"

Pertanyaan 3 :

Sejauh mana rincian alokasi dana dijelaskan kepada masyarakat?

Jawaban :

"ngga ada kan tadi kepentingan DAU hanya untuk operasional saja"

Pertanyaan 4 :

Apa saja saluran komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kelurahan untuk menyebarluaskan informasi terkait DAU?

Jawaban :

"Tidak ada"

Pertanyaan 5 :

Bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan DAU? Apakah ada Platform daring resmi atau pertemuan publik yang diadakan secara rutin?

Jawaban :

"Tidak ada, kami tidak memberikan informasi kemasayarakat, karena tanggung jawab kita ke lembaga pemeriksa baik PPK atau pihak Kabupaten. Mungkin Kabupaten yang mempublikasikan ke masyarakat"

Pertanyaan 6 :

Bagaimana prosedur pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan DAU dijelaskan ke masyarakat?

Jawaban :

"Tidak melibatkan masyarakat

Pertanyaan 7 :

Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan? Jika iya bagaimana caranya?

Jawaban :

"Tidak melibatkan masyarakat"

Pertanyaan 8 :

Bagaimana mekanisme akuntabilitas diterapkan oleh Pemerintah Kelurahan dalam pengelolaan DAU?

Jawaban :

"dengan melaporkan atau berkomunikasi dengan pengawas dan INSPEKTORAT"

Pertanyaan 9 :

Bagaimana proses pengawasan internal dilakukan dalam pengelolaan DAU?

Jawaban :

"Kami saling mengingatkan baik itu tusi maupun fusinya"

Pertanyaan 10 :

Apakah ada lembaga audit independen atau pihak ketiga yang terlibat dalam mengawasi pengelolaan DAU? Jika ya, bagaimana peran mereka?

Jawaban :

iya ada dari INSPEKTORAT dan BPK. Yang ebrtugas untuk mengawasi jalannya program"

Pertanyaan 11 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan merespons umpan balik dan pertanyaan masyarakat terkait pengelolaan DAU?

Jawaban :

"Tidak ada pertanyaan

Pertanyaan 12 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan memastikan bahwa alokasi dana digunakan untuk program dan proyek sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Jawaban :

"Disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dan masyarakat contohnya dengan melakukan pelatihan kepada masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan"

Pertanyaan 13 :

Sejauh mana target pembangunan yang direncanakan tercapai melalui program dan proyek DAU?

Jawaban :

"ada beberapa perencanaan pembangunan tapi tidak acc untuk pengerjannya"

Pertanyaan 14 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan memastikan ketaatan terhadap regulasi keuangan dalam penggunaan DAU?

Jawaban :

Yaa dengan mengikuti peraturan yang ada, kami ngga berani untuk melanggar peraturan tersebut karena bisa berakibat fatal bagi kami

Pertanyaan 15 :

Bagaimana integritas manajemen keuangan DAU dijaga oleh Pemerintah Kelurahan?

Jawaban :

"Melalui SIPD baik dari perencanaan kegiatan dan anggaran kegiatan."

E. Kelurahan : Kelurahan Karangpucung

Nama : Ibu Sri Lestari endah Meilawati S.E

Jabatan : Kasi Pemerintahan

Pertanyaan 1 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan mempublikasikan laporan keuangan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU)?

Jawaban :

" Melalui Sitem yaitu SIPD.RI, monev yang dilakukan setiap triwulan dan juga ada bentuk fisik"

Pertanyaan 2 :

Apakah daftar program dan proyek yang didanai melalui DAU dipublikasikan secara terbuka? Jika ya, melalui media apa saja?

Jawaban :

Dilaporkan kepada masyarakat melalui MUSRENBANG kelurahan kemudian MUSRENBANG kecamatan"

Pertanyaan 3 :

Sejauh mana rincian alokasi dana dijelaskan kepada masyarakat?

Jawaban :

"Kami Menjelaskan dan ayang digunakan untuk pembuatan Sarpras kepada masyarakat"

Pertanyaan 4 :

Apa saja saluran komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kelurahan untuk menyebarluaskan informasi terkait DAU?

Jawaban :

"Melalui Grup WA yang berisi ketua RT dan RW"

Pertanyaan 5 :

Bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan DAU? Apakah ada Platform daring resmi atau pertemuan ublik yang diadakan secara rutin?

Jawaban :

"Kami menanggapi pertanyaan melalui MUSRENBANG"

Pertanyaan 6 :

Bagaimana prosedur pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan DU dijelaskan ke masyarakat?

Jawaban :

"melalui itu tadi MUSRENBANG Kelurahan terus ke MUSRENBANG kecamatan seperti itu"

Pertanyaan 7 :

Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan? Jika iya bagaimana caranya?

Jawaban :

Iya melalui MUSRENBANG dnegan mengusulkan saran untuk program atau pembenahan daerah sekitar yang bersifat urgent"

Pertanyaan 8 :

Bagaimana mekanisme akuntabilitas diterapkan oleh Pemerintah Kelurahan dalam pengelolaan DAU?

Jawaban :

"Dengan melaporkannya ke SIPD.RI"

Pertanyaan 9 :

Bagaimana proses pengawasan internal dilakukan dalam pengelolaan DAU?

Jawaban :

"Pengawasan internal oleh INSPEKTORAT dan BPKP"

Pertanyaan 10 :

Apakah ada lembaga audit independen atau pihak ketiga yang terlibat dalam mengawasi pengelolaan DAU? Jika ya, bagaimana peran mereka?

Jawaban :

"ya ada , kaya lingkup Kabupaten dan Pusat gituu"

Pertanyaan 11 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan merespons umpan balik dan pertanyaan masyarakat terkait pengelolaan DAU?

Jawaban :

"Yaitu dengan menampung opini masyarakat melalui MUSRENBANG dan kemudian di kecamatan dan kabupaten"

Pertanyaan 12 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan memastikan bahwa alokasi dana digunakan untuk program dan proyek sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Jawaban :

"Usulan yang sudah disampaikan sudah dimasukkan ke dalam DPA"

Pertanyaan 13 :

Sejauh mana target pembangunan yang direncanakan tercapai melalui program dan proyek DAU?

Jawaban :

"Dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada di DPA"

Pertanyaan 14 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan memastikan ketaatan terhadap regulasi keuangan dalam penggunaan DAU?

Jawaban :

"Melalui SIPD.Ri karena terkirim langsung ke pusat"

Pertanyaan 15 :

Bagaimana integritas manajemen keuangan DAU dijaga oleh Pemerintah Kelurahan?

Jawaban :

"Melalui SIPD baik dari perencanaan kegiatan dan anggaran kegiatan"

F. Kelurahan : Kelurahan Berkoh

Nama : Ibu Haryanti dan Bapak rifqi

Jabatan : Sekretaris Kelurahan dan Staff Keuangan Kelurahan

Pertanyaan 1 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan mempublikasikan laporan keuangan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU)?

Jawaban :

"Melalui aplikasi LPSE/SIRIP MUSRENBANGKEL"

Pertanyaan 2 :

Apakah daftar program dan proyek yang didanai melalui DAU dipublikasikan secara terbuka? Jika ya, melalui media apa saja?

Jawaban :

"Iya betul melalui LPSE/SIRUP"

Pertanyaan 3 :

Sejauh mana rincian alokasi dana dijelaskan kepada masyarakat?

Jawaban :

"sebelum dan sesudah disampaikan kepada masyarakat melalui MUSRENBANG"

Pertanyaan 4 :

Apa saja saluran komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kelurahan untuk menyebarluaskan informasi terkait DAU?

Jawaban :

"Apliakasi LPSE/SIRUP dan MUSRENBANG"

Pertanyaan 5 :

Bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan DAU? Apakah ada Platform daring resmi atau pertemuan ublik yang diadakan secara rutin?

Jawaban :

"iya iu tadi melalui LPSE/SIRUP, MUSRENBANG"

Pertanyaan 6 :

Bagaimana prosedur pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan DU dijelaskan ke masyarakat?

Jawaban :

"Kami mengumpulkan keluhan atau opini sebelumnya masing-masing dari rt atau rw karena kami menyediakan blangko untuk setiap rt rw untuk pembangunan di kelurahan"

Pertanyaan 7 :

Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan? Jika iya bagaimana caranya?

Jawaban :

"iya melibatkan dari opini atau saran atdi kami dapat dari MUSRENBANG"

Pertanyaan 8 :

Bagaimana mekanisme akuntabilitas diterapkan oleh Pemerintah Kelurahan dalam pengelolaan DAU?

Jawaban :

"dalam pembangunan program dibentuk tim perencanaan dan pengawasan di luar pemerintah kelurahan berkoh "

Pertanyaan 9 :

Bagaimana proses pengawasan internal dilakukan dalam pengelolaan DAU?

Jawaban :

"Pengawasan dilakukanoleh pejabat pengadaan , Inspektorat dan tim pengawas"

Pertanyaan 10 :

Apakah ada lembaga audit independen atau pihak ketiga yang terlibat dalam mengawasi pengelolaan DAU? Jika ya, bagaimana peran mereka?

Jawaban :

"iya ada jasa pengawassa kepada pihak lain"

Pertanyaan 11 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan merespons umpan balik dan pertanyaan masyarakat terkait pengelolaan DAU?

Jawaban :

"kami menyebarkannya melalui grup WA yang berisi ketua RT dan RW "

Pertanyaan 12 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan memastikan bahwa alokasi dana digunakan untuk program dan proyek sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Jawaban :

Sebelum pembangunan dilaksanakan MUSRENBANG yang menayring semua kebutuhan masyarakat kemudian dibuat skala prioritas"

Pertanyaan 13 :

Sejauh mana target pembangunan yang direncanakan tercapai melalui program dan proyek DAU?

Jawaban :

"tercapai 100%"

Pertanyaan 14 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan memastikan ketaatan terhadap regulasi keuangan dalam penggunaan DAU?

Jawaban :

"SPJ diverifikasi tim keuangan kelurahan dan kemudian tim keuangan kecmaatan dan BKAD"

Pertanyaan 15 :

Bagaimana integritas manajemen keuangan DAU dijaga oleh Pemerintah Kelurahan?

Jawaban :

"Dengan melakukan sesuai SOP"

G. Kelurahan : Kelurahan Purwokerto Kidul

Nama : Ibu Esti

Jabatan : Sekretaris Kelurahan

Pertanyaan 1 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan mempublikasikan laporan keuangan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU)?

Jawaban :

"melalui SIPD.RI"

Pertanyaan 2 :

Apakah daftar program dan proyek yang didanai melalui DAU dipublikasikan secara terbuka? Jika ya, melalui media apa saja?

Jawaban :

"Iya Melalui SIPD.RI"

Pertanyaan 3 :

Sejauh mana rincian alokasi dana dijelaskan kepada masyarakat?

Jawaban :

"terdapat penyampaian rencana pembangunan di MUSRENBANG"

Pertanyaan 4 :

Apa saja saluran komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kelurahan untuk menyebarluaskan informasi terkait DAU?

Jawaban :

"Biasanya menggunakan grup WA yang berisi perwakilan setiap RT RW"

Pertanyaan 5 :

Bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan DAU? Apakah ada Platform daring resmi atau pertemuan publik yang diadakan secara rutin?

Jawaban :

"melalui MUSRENBANG dan WA grup"

Pertanyaan 6 :

Bagaimana prosedur pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan DAU dijelaskan ke masyarakat?

Jawaban :

"iya tadi melalui penyampaian opini di MUSRENBANG"

Pertanyaan 7 :

Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan? Jika iya bagaimana caranya?

Jawaban :

"melalui MUSRENBANG"

Pertanyaan 8 :

Bagaimana mekanisme akuntabilitas diterapkan oleh Pemerintah Kelurahan dalam pengelolaan DAU?

Jawaban :

"melaporkannya ke SIPD.RI setiap rinciannya"

Pertanyaan 9 :

Bagaimana proses pengawasan internal dilakukan dalam pengelolaan DAU?

Jawaban :

"Pengawasan internal oleh INSPEKTORAT"

Pertanyaan 10 :

Apakah ada lembaga audit independen atau pihak ketiga yang terlibat dalam mengawasi pengelolaan DAU? Jika ya, bagaimana peran mereka?

Jawaban :

"iya ada dari INSPEKTORAT bertugas untuk mengawasi jalannya program"

Pertanyaan 11 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan merespons umpan balik dan pertanyaan masyarakat terkait pengelolaan DAU?

Jawaban :

"iya seperti tadi menampung opini masyarakat"

Pertanyaan 12 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan memastikan bahwa alokasi dana digunakan untuk program dan proyek sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Jawaban :

"dengan menggunakan skal aprioritas"

Pertanyaan 13 :

Sejauh mana target pembangunan yang direncanakan tercapai melalui program dan proyek DAU?

Jawaban :

"semua prgram 100% tercapai karena sudah direncanakan 1 tahun sebelumnya"

Pertanyaan 14 :

Bagaimana Pemerintah Kelurahan memastikan ketaatan terhadap regulasi keuangan dalam penggunaan DAU?

Jawaban :

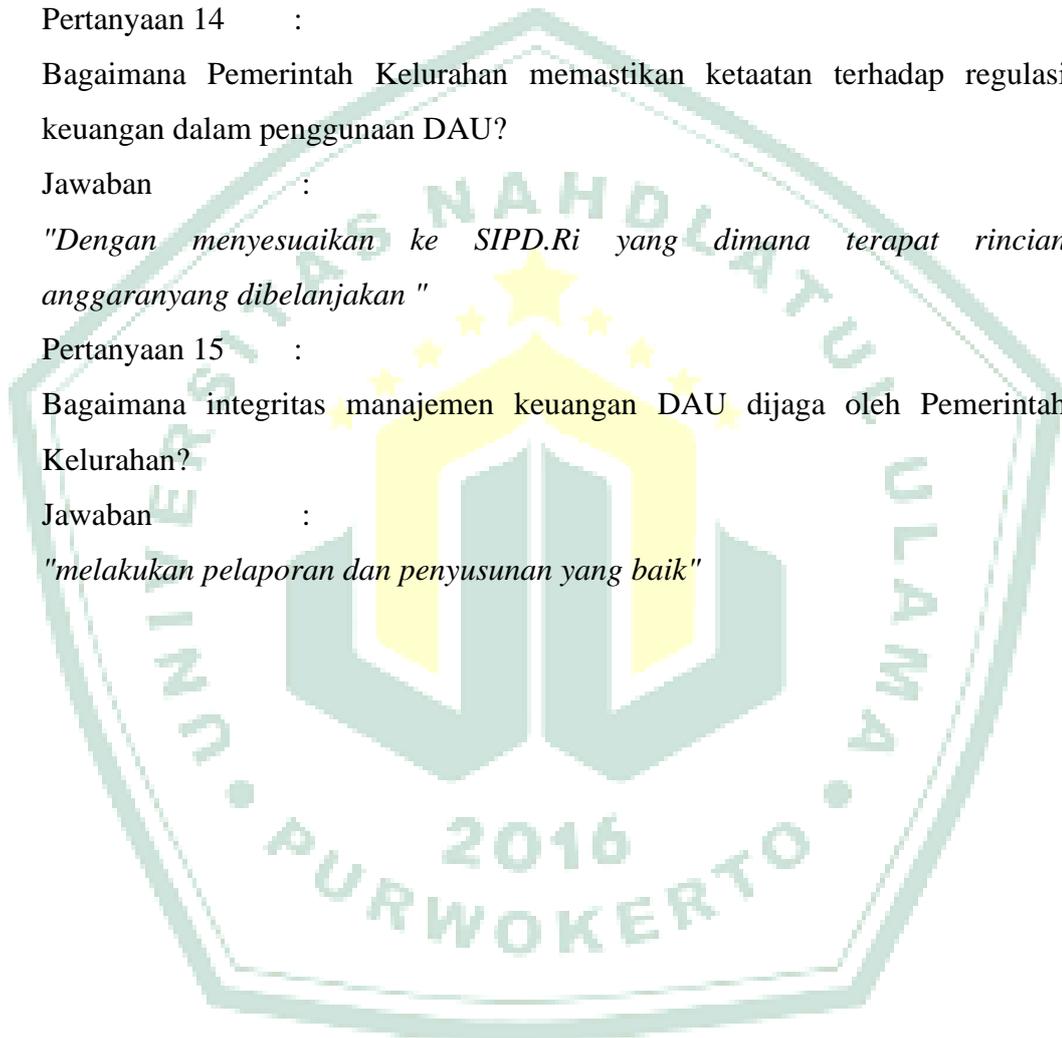
"Dengan menyesuaikan ke SIPD.Ri yang dimana terapat rincian anggaran yang dibelanjakan "

Pertanyaan 15 :

Bagaimana integritas manajemen keuangan DAU dijaga oleh Pemerintah Kelurahan?

Jawaban :

"melakukan pelaporan dan penyusunan yang baik"



Lampiran 4 Ringkasan Hasil Wawancara Dengan Narasumber

Tabel IV Hasil Wawancara

Kelurahan	TANJUNG	PWT KULON	KARANGKLESEM	TELUK	KARANGPUCUNG	BERKOH	PWT KIDUL
1	"kami tidak melaporkan ke masyarkat karena kewajiban kita hanya kepda kecamatan dan kabupaten"	"kami tida melaporkan atau melakukan publikasi DAU ke masyarakat hanya ke Kecamatan atau Kabupaten"	"melaporkan ke kecamatan melalui SPJ keuangan"	"belum ada komunikasi dengan masyarakat mengenai ini"	" Melalui Sitem yaitu SIPD.RI, monev yang dilakukan setiap triwulan dan juga ada bentuk fisik"	"Melalui aplikasi LPSE/SIRIP MUSRENBANG KEL"	"melalui SIPD.RI"

Kelurahan	TANJUNG	PWT KULON	KARANGKLESEM	TELUK	KARANGPUCUNG	BERKOH	PWT KIDUL
2	<i>"Ya, melalui MUSRENBANG di setiap tahunnya"</i>	<i>"Tidak Melakukan publikasi ke masyarakat"</i>	<i>"Melalui Aplikasi SIRUP"</i>	<i>"Tidak ada, karena DAU ini digunakan untuk pemeliharaan kelurahan dan belanja bulanan"</i>	<i>"Dilaporkan kepada masyarakat melalui MUSRENBANG kelurahan kemudian MUSRENBANG kecamatan"</i>	<i>"Iya betul melalui LPSE/SIRUP"</i>	<i>"Iya Melalui SIPD.RI"</i>
3	<i>"Tentu akan disampaikan apa saja bentuk kegiatannya dan pemilihan kegiatannya, yaitu skala prioritasnya"</i>	<i>"Tidak melakukan menjelaskan rincian alokasi dana ke masyarakat"</i>	<i>"kami menjelaskan melalui LPMK, MUSRENBANG tingkat kelurahan"</i>	<i>"ngga ada kan tadi kepentingan DAU hanya untuk operasional saja"</i>	<i>"Kami Menjelaskan dan ayang digunakan untuk pembuatan Sarpras kepada masyarakat"</i>	<i>"sebelum dan sesudah disampaikan kepada masyarakat melalui MUSRENBANG"</i>	<i>"terdapat penyampaian rencana pembangunan di MUSRENBANG"</i>

Kelurahan	TANJUNG	PWT KULON	KARANGKLESEM	TELUK	KARANGPUCUNG	BERKOH	PWT KIDUL
4	<i>"Ya disini melalui MUSRENBANG, kegiatan-kegiatan rapat koordinasi pemerintah baik dari rt maupun rw dan pihak lainnya. Dan untuk salurannya bisa WA grup"</i>	<i>"Saluran yang digunakan adalah yang digunakan untuk melaporkan alokasi dana ke pemerintah pusat yaitu SIPD.RI dannanti dari pihak kecamatan juga melaorka ke BKAD. Kami juga meyerahkan bentuk hardfile ke kecamatan"</i>	<i>"Melalui LPMK (Lembaga Masyarakat Kelurahan"</i>	<i>"Tidak ada"</i>	<i>"Melalui Grup WA yang berisi ketua RT dan RW"</i>	<i>"Apliakasi LPSE/SIRUP dan MUSRENBANG"</i>	<i>"Biasanya menggunakan grup WA yang berisi perwakilan setiap RT RW"</i>

Kelurahan	TANJUNG	PWT KULON	KARANGKLE SEM	TELUK	KARANGPUCUNG	BERKOH	PWT KIDUL
5	"Akses informasi dapat diambil dari pertemuan MUSRENBANG dan kegiatan koordinasi. Paltform dari tidak disebutkan terlalu rinci mengenai DAU tapi di grup WA di berikan informasi mengenai rincian pembangunan yang akan dilaksanakan "	"Untuk DAKEL itu masyarkat menyampaiaikan di MUSRENBANG mengenai pembangunan yang ingin dilakukan"	"melakukan rapat koordinasi bersama yaitu antara LPMK dengan masyarakat"	"Tidak ada, kami tidak memberikan informasi kemasayarakat , karena tanggung jawab kita ke lemabag pemeriksa baik PPK atau pihak Kabupaten. Mungkin Kanbupaten yang mempublikasikan ke masayarkat"	"Kami menanggapi pertanyaan melalui MUSRENBANG "	"iya iu tadi melalui LPSE/SIRUP, MUSRENBANG"	"melalui MUSRENBANG dan WA grup"

Kelurahan	TANJUNG	PWT KULON	KARANGKLESEM	TELUK	KARANGPUCUNG	BERKOH	PWT KIDUL
6	"Melalui MURENBANG"	"kami tidak menyebarluaskan informasi terkait DAU"	"melalui itu tadi MUSRENBANG"	"Tidak melibatkan masyarakat"	"melalui itu tadi MUSRENBANG Kelurahan terus ke MUSRENBANG kecamatan seperti itu"	"Kami mengumpulkan keluhan atau opini sebelumnya masing-masing dari rt atau rw karena kami menyediakan blangko untuk setiap rt rw untuk pembangunan di kelurahan"	"iya tadi melalui penyampaian opini di MUSRENBANG"

Kelurahan	TANJUNG	PWT KULON	KARANGKLESEM	TELUK	KARANGPUCUNG	BERKOH	PWT KIDUL
7	<i>"Dari tadi, penyampaian opini di MUSRENBANG, dan keumidan dipilih berdasarkan skal aprioritas yang mampu di danai oleh DAU pemerintah, karena dana nya terabtas"</i>	<i>"Melibatkan untuk memberikan opini atau saran di dalam MUSRENBANG"</i>	<i>"Melalui MURENBANG yang diadakan setiap 1 tahun sekali"</i>	<i>"Tidak melibatkan masayrakat"</i>	<i>"Iya melalui MUSRENBANG dnegan mengusulkan saran untuk program atau pembenahan daerah sekitar yang bersifat urgent"</i>	<i>"iya melibatkan dari opini atau saran atdi kami dapat dari MUSRENBANG"</i>	<i>"melalui MUSRENBANG"</i>

Kelurahan	TANJUNG	PWT KULON	KARANGKLESEM	TELUK	KARANGPUCUNG	BERKOH	PWT KIDUL
8	"kami tidak bisa menetapkan itu, karena aturan itu dari pemerintah dalam permendagri 130 tahun 2018. Informasi mengenai selesainya program kerja kami sampaikan ke masyarakat"	"Dengan mengevaluasi kembali anggaran yang nantinya akan dilaporkan ke kecamatan"	"Dengan mengoptimalkan jumlah alokasi dana dari Pemerintah"	"dengan melaporkan atau berkomunikasi dengan pengawas dan INSPEKTORAT"	"Dengan melaporkannya ke SIPD.RI"	"dalam pembangunan program dibentuk tim perencanaan dan pengawasan di luar pemerintah kelurahan berkoh "	""melaporkannya ke SIPD.RI setiap rinciannya"

Kelurahan	TANJUNG	PWT KULON	KARANGKLESEM	TELUK	KARANGPUCUNG	BERKOH	PWT KIDUL
9	<i>"Dalam penyelenggaraan DAU itu disediakan untuk perencanaan dan pengawasan, tusi perencanaan oleh LPMK dan pengawasan internal dilakukan oleh Dinas teknis terkait"</i>	<i>"melakukan tinjauan ulang atas program yang dijalankan dan bekerja sama dengan para pengawas"</i>	<i>"Dengan membuat SPJ agar setiap hal yang di belanjakan dapat dengan jelas di laporkan"</i>	<i>"Kami saling mengingatkan baik itu tusi maupun fusinya"</i>	<i>"Pengawasan internal oleh INSPEKTORAT dan BPKP"</i>	<i>"Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengadaan , Inspektorat dan tim pengawas"</i>	<i>"Pengawasan internal oleh INSPEKTORAT"</i>

Kelurahan	TANJUNG	PWT KULON	KARANGKLESEM	TELUK	KARANGPUCUNG	BERKOH	PWT KIDUL
10	"kami tidak punya wewenang untuk ini tetapi secara umum pengawasan secara umum di lakukan oleh INSPEKTOR AT, yang nantinya akan meneliti dari perencanaan dan pelaksanaan"	"ada, dari rekanan yang mengawasi jalannya sampai selesai, baik dari pemda dan pusat. Dan melihat lagi bahwa apakah pengerjaan sudah sesuai prosedur atau belum"	"ya ada , yaitu BKAD yang tuagsnya untuk mengevaluasi SPJ"	"iya ada dari INSPEKTOR AT dan BPK. Yang ebtugas untuk mengawasi jalannya program"	"ya ada , kaya lingkup Kabupaten dan Pusat gitu"	"iya ada jasa pengawassa kepada pihak lain"	"iya ada dari INSPEKTORAT bertugas untuk mengawasi jalannya program"

Kelurahan	TANJUNG	PWT KULON	KARANGKLE SEM	TELUK	KARANGPUCUNG	BERKOH	PWT KIDUL
11	"Melalu tatap muka"	"biasanya ini diwakilkan oleh baik ketua RT atau RW, yang berasal dari warga masing-masing melalui formulir yang sudah disediakan. Kemudian dari pihak RT maupun RW yang menanyakan ke kelurahan"	"masyarkat melakuakn koordinasi dengan Lurah melalui LPMK"	"Tidak ada pertanyaan"	"Yaitu dengan menampung opini masayarakat melalui MUSRENBANG dan kemudian di kecamatan dan kabupaten"	"kami menyebarkannya melalui grup WA yang berisi ketua RT dan RW "	"iya seperti tadi menampung opini masyarakat"

Kelurahan	TANJUNG	PWT KULON	KARANGKLESEM	TELUK	KARANGPUCUNG	BERKOH	PWT KIDUL
12	<i>"kami menyakini itu sudah sesuai karena itu dilaksanakan menurut skala prioritas yang ada"</i>	<i>"Memastikan nya karena sudah ada usulan dari warga yang dikumpulkan tadi di MUSRENBANG dan kemudian dipilih yang palingurgent atau menurut skala prioritasnya"</i>	<i>"Melakukan koordinasi dengan pihak rekanan"</i>	<i>"Disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dan masyarakat contohnya dengan melakukan pelatihan kepada masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan"</i>	<i>"Usulan yang sudah disampaikan sudah dimasukkan ke dalam DPA"</i>	<i>"Sebelum pembangunan dilaksanakan MUSRENBANG yang menayring semua kebutuhan masyarakat kemudian dibuat skala prioritas"</i>	<i>"dengan menggunakan skal aprioritas"</i>

Kelurahan	TANJUNG	PWT KULON	KARANGKLESEM	TELUK	KARANGPUCUNG	BERKOH	PWT KIDUL
13	<i>"100%, karena sudah direncanakan di tahun anggaran sebelumnya"</i>	<i>"Ada pembangunan yang terealisasi dan ada yang tidak"</i>	<i>"kami melihat dari pelaksanaan pekerjaan di lokasi pembangunannya"</i>	<i>"ada beberapa perencanaan pembangunan tapi tidak acc untuk pengerjannya"</i>	<i>"Dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada di DPA"</i>	<i>"tercapai 100%"</i>	<i>"semua program 100% tercapai karena sudah direncanakan 1 tahun sebelumnya"</i>

Kelurahan	TANJUNG	PWT KULON	KARANGKLESEM	TELUK	KARANGPUCUNG	BERKOH	PWT KIDUL
14	<p>"di dalam penggunaan DAU terdapat aturan utamanya, dimulai dai penyusunan anggaran yang disaring di MUSRENBA Ng dan ditetpakn di DPA. Kami harus mengunggah perencanaan di LPSM. Aturan ini adalah aturan baku yang dimana harus dilaksanakan "</p>	<p>"terdapat tim perencanaan dan tim pengawas"</p>	<p>"kami melakukan setiap keuangan dengan menaatai atau melakukan sesuai dengan SPK"</p>	<p>"</p>	<p>"Melalui SIPD.Ri karena terkirim langsung ke pusat"</p>	<p>"SPJ diverifikasi tim keuangan kelurahan dan kemudian tim keuangan keamatan dan BKAD"</p>	<p>"Dengan menyesuaikan ke SIPD.Ri yang dimana terapat rincian anggaranyang dibelanjakan "</p>

Kelurahan	TANJUNG	PWT KULON	KARANGKLESEM	TELUK	KARANGPUCUNG	BERKOH	PWT KIDUL
15	<i>"Kami dari kelurahan hanya mentaati setiap regulasi yang ada"</i>	<i>"dengan menyusun RAB yang diawal sudah menyusun perencanaan sampai dengan akhir yang nanti akan ditinjau kembali. Apakah harga sesuai dengan yang direncanakan atau tidak"</i>	<i>"Dengan kami membuat SPJ tepat waktu"</i>		<i>"Melalui SIPD baik dari perencanaan kegiatan dan anggaran kegiatan"</i>	<i>"Dengan melakukan sesuai SOP"</i>	<i>"melakukan pelaporan dan penyusunan yang baik"</i>

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



Wening Galih Pangestuti lahir di Temanggung 14 desember 2002. Penulis merupakan anak ke dua dari 4 bersaudara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama islam. Alamat email weweningumah@gmail.com.

Riwayat pendidikan penulis yaitu menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Kebocoran pada tahun 2014, lalu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Purwokerto dan tamat pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020 menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMK Swagaya 1 Purwokerto. Selanjutnya pada 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Akutansi, Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dan lulus pada tahun 2024.

Selama berkuliah penulis mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi selama 1 periode yaitu periode 2022-2023 sebagai anggota dan 2023-2024 sebagai coordinator Departemen Riset dan pengembangan.